

kiai dan pejabat publik diantaranya: Relasi paternalistik, relasi kolegal dan relasi ideologis.

Kedua, bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan tidak dapat dihindarkan, meski sebagian kiai tidak terikat dengan partisipasi tersebut. Partisipasi kiai terjadi bukan hanya latar belakang kiai dari lembaga pendidikan Islam (pesantren) dengan kerangka keilmuannya. Akan tetapi hubungan ini juga terjadi sejak proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan memiliki bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan partisipasi yang dimainkan oleh kiai, ustad, *nyai*, atau santri. Penulis memetakan beberapa bentuk partisipasi kiai dengan mengamati berbagai proses partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan diantaranya: *pertama*, partisipasi Intensif, yaitu kiai aktif terlibat langsung dalam pemerintahan (mencolok), di mana mereka berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus konsultan kebijakan. *Kedua*, partisipasi moderat, yaitu kiai tidak terlalu terjun langsung dalam penentuan kebijakan pendidikan tidak aktif tidak pula pasif, dan *ketiga*, partisipasi konfrontatif, yaitu partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan lebih kepada hubungan institusional dengan pola yang cenderung kontra terhadap pemerintah.

Ketiga, implikasi partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di Bangkalan. Analisis terhadap

hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentangan hubungan agama dan negara, hingga dampak-dampak material yang mungkin diperoleh oleh pesantren. Namun demikian, penulis petakan implikasi yang ditimbulkan dari partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan menjadi tiga antara lain: *Pertama*, dominasi kiai pesantren terhadap pejabat dan masyarakat. Pada saat yang sama, beberapa implikasi turut menyertai partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan. *Kedua*, yakni peningkatan kualitas pendidikan Islam di Bangkalan *Ketiga*, yaitu respon masyarakat terhadap partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, karena Partisipasi tersebut adalah sebuah tradisi yang mengakar, seiring kuatnya pengaruh Bani Kholil di masyarakat serta kearifan lokal di Bangkalan yang masih kental akan budaya kepesantrenan. Dan dari hasil analisis penulis, Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam terkhusus pendidikan pesantren.

B. Implikasi Teoretik

Ada beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, mulai dari teori hegemoni Antonio Gramsci, teori kekuasaan Michael Foucault dan teori kebijakan publik William N. Dunn. Ketiganya penulis gunakan untuk menganalisis partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Dominasi kiai di Bangkalan itu merupakan bagian dari pengaruh kuat Bani Kholil. Sehingga dengan mudah kiai memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kuasa dalam pusran politik di Bangkalan. Di sisi lain, ini adalah *power of culture* sekaligus *power of legitimate* yang dimiliki kiai di

Bangkalan dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam di kota dzikir dan shalawat ini.

Dalam tatanan masyarakat Bangkalan, kiai digolongkan dalam kelompok elit, yang mana memiliki pengaruh kekuasaan ditingkat lokal baik secara formal maupun non-formal. Dikatakan formal jika kiai menduduki posisi jabatan secara administratif seperti jabatan eksekutif dan legislatif. Contoh konkrit kiai menduduki jabatan formal ketika R.KH. Fuad Amin menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Bila non-formal, kiai hanya menduduki jabatan strategis yang memiliki pengaruh langsung ke masyarakat seperti organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Jadi kiai menempati segala kedudukan yang memiliki legitimasi secara formal maupun non-formal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan Islam terutama di Bangkalan ke depan. Sehingga muara dari penelitian ini bukan sekedar mendiskripsikan partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan. Namun lebih kepada pemetaan bentuk relasi kuasa kiai pesantren dengan pejabat publik (paternalistik, kolegial, dan ideologis), dan bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan (intensif, moderat dan konfrontatif), serta implikasi partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan (dominasi kiai terhadap pejabat dan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan Islam di Bangkalan, dan respon masyarakat terhadap partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan).

Maka berdasarkan hal tersebut, ada perbedaan teoretik antara teori hegemoni Gramsci dengan kondisi objektif di Bangkalan. Dalam teori hegemoninya, Gramsci lebih menekankan kepada faktor ekonomi. Sementara di Bangkalan hegemoni kiai lebih kepada hegemoni patrimonialisme agama yaitu: ada tokoh yang di tokohkan, dan terjadi subkoordinasi antara kiai dengan pejabat publik di Bangkalan. ini yang menjadi kebaruan dan menjadikan temuan dari penulis. Sehingga ini adalah sebuah upaya untuk menambah referensi sekaligus mengawal kebijakan melalui penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Tak ada gading yang tak retak. Sebuah pepatah yang mencerminkan penelitian ini. Dalam proses melakukan penelitian hingga hasil akhir penelitian ini, tentu terdapat keterbatasan-keterbatasan, yang menjadi kekurangan penulis. Keterbatasan tersebut di antaranya:

Pertama, lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini hanya berpusat di Bangkalan dengan karakter masyarakat yang paternalistik. Hampir terjadi keteraturan-keteraturan baik di pusat kota hingga pelosok desa. Sehingga hasil penelitian ini perlu untuk dibandingkan dengan kabupaten lain di Madura.

Kedua, penelitian pembandingan. Telah kita ketahui bersama bahwa penelitian tentang pesantren banyak dilakukan. Demikian pula dengan penelitian tentang politik pendidikan islam yang telah diuraikan oleh beberapa peneliti terdahulu. Maka penelitian ini bersifat penyelarasan serta pembandingan bagi penelitian lain.

Ketiga, Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan belum komprehensif. Maka perlu dipetakan mulai era Orde Lama, Orde Baru ataupun era Reformasi. Sehingga ada kajian historis yang lengkap sebagai konstruksi sebuah penelitian politik pendidikan islam .

D. Rekomendasi

Dalam melakukan perencanaan pendidikan kabupaten Bangkalan, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis situasi untuk mengetahui "situasi pendidikan saat ini" dan "situasi pendidikan yang diharapkan atau ditargetkan" menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat diketahui melalui kebijakan *substantif*, *implementatif*, program serta rencana kegiatan yang dapat dipikirkan secara *integrated*. Dalam konteks penyusunan perencanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, serta masyarakat melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pada regulasi inilah sosok kiai yang notabene seorang yang sangat dihormati dalam kultur masyarakat Madura, mengambil peranan serta ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Sudah di ketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Di mana terdapat kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di antaranya kebijakan yang diturunkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atau regulasi lain.